

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 6 ayat (1) presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya berdasarkan ayat (2) bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut dari presiden diserahkan kepada kepala pemerintahan gubernur/bupati/walikota untuk mengelola keuangan daerah dan kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.¹

Undang-Undang No. 33/2004 perubahan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari daerah itu sendiri yang terdiri dari ; (1) hasil pajak daerah, (2) hasil dari retribusi daerah, (3) hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan berbagai pos pendapatan sumber dana yang tersedia diharapkan dapat menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak

¹ Ujang Bahar. *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Antara Teori dan Praktik* (2009).

kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Qodarachman (2010) mengutip bahwa dengan adanya wewenang pemerintah daerah merupakan salah satu peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri, termasuk meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada kepala daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sebagai sumber utama pembiayaan pemerintah daerah PAD dihasilkan dari beberapa sumber yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dan lain-lain dari PAD yang sah (Bahar, 2009: 140).²

Selain dari sumber pendapatan daerah yang disebut di atas, ada sumber pendapatan lain yaitu dari sektor Pariwisata. Sektor pariwisata memberikan dukungan dan kontribusi di bidang perekonomian di suatu wilayah atau daerah, sektor ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal (Nurman, 2015: 183).³

Selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sektor pariwisata ini juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nasional, mengurangi

² *Idem*

³ Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*. (2015).

pengangguran, menciptakan lapangan kerja, juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan sektor pariwisata akan menambah daya tarik daerah untuk dijadikan destinasi wisata oleh wisatawan. Seiring dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung akan memicu masyarakat untuk membuka usaha yang berkaitan dengan pendukung pariwisata seperti hotel, restoran, usaha perjalanan wisata, dan lain sebagainya. Hal ini akan menambah pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi dari usaha pariwisata yang dijalankan oleh masyarakat. Selain itu, dengan adanya usaha pariwisata tersebut akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berada di sekitar daerah pariwisata.

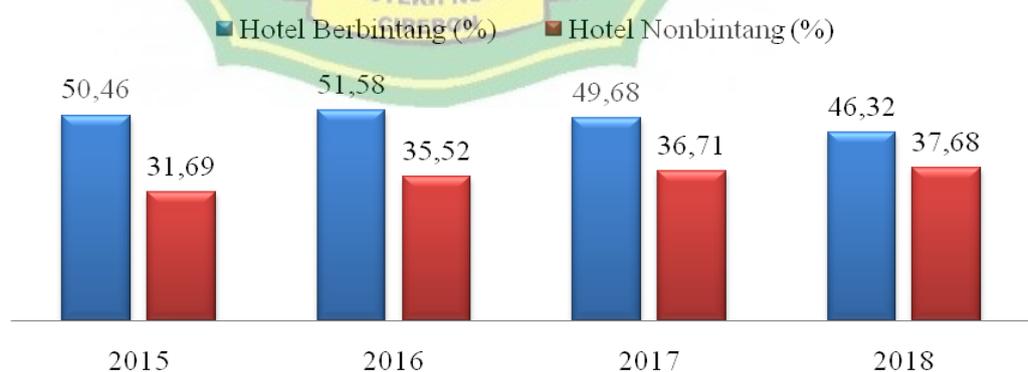
Wisata halal merupakan konsep yang relatif baru dalam kajian pariwisata dewasa ini. Banyak wisatawan merasa canggung dengan hadirnya konsep wisata halal yang mengedepankan nilai-nilai Islam. Tetapi, jika dicermati lebih mendalam, wisata halal bukan sebuah hal yang menakutkan bagi wisatawan karena wisata halal bisa dikatakan hanya melengkapi wisata konvensional yang telah ada. Posisi wisata halal adalah semacam alternatif bagi wisatawan Islam yang ingin mendapatkan tidak hanya kebutuhan wisata, tetapi juga kebutuhan spritual. Wisata halal, tidak hanya milik wisatawan Islam saja, wisatawan non-Islam juga diperbolehkan untuk menikmati wisata halal.

Dalam konteks perkembangan pariwisata halal, kita bisa telusuri bahwa perkembangan wisata halal tidak bisa dilepaskan dari wisata religi,

wisata syariah dan kemudian berkembang menjadi wisata halal (Fatkurrohman, 2017).⁴

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang dapat diandalkan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Untuk itu, pemerintah Jawa Barat dituntut untuk terus mengembangkan dan menggali potensi-potensi pariwisata yang ada saat ini sebagai usaha untuk mendapatkan sumber dana bagi pembangunan daerah dengan upaya melakukan terobosan-terobosan baru dengan cara membenahi obyek wisata lama dan membuka obyek baru, serta memperbaiki infrastruktur jalan yang kondisinya masih kurang baik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar pariwisata di Jawa Barat memiliki daya tarik tersendiri untuk para wisatawan yang ingin berkunjung.

Pembangunan pariwisata di Jawa Barat selama ini telah memberikan hasil yang terus meningkat. Hal tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang dan menginap di hotel bintang dan hotel non-bintang.



Gambar 1.1 Jumlah Kunjungan Hotel di Jawa Barat

Sumber: Disbudpar Jawa Barat, BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka (diolah)

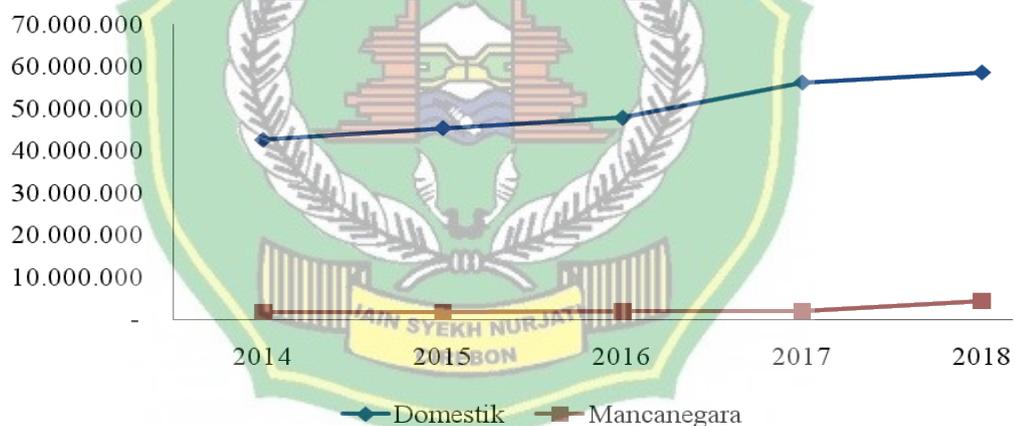
⁴ Fatkurrohman. *Developing Yogyakarta's Halal Tourism Potential for Strengthening Islamic Economy in Indonesia*. (2017).

Begitu pula Jumlah wisatawan di Kota dan Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, serta Kuningan yang meningkat setiap tahunnya.

Tahun	Wisatawan		Jumlah	
	Mancanegara	Domestik		
1	2014	1.905.378	42.758.063	44.663.441
2	2015	1.794.401	45.536.179	47.330.580
3	2016	1.962.639	47.992.088	49.954.727
4	2017	2.027.629	56.334.706	58.362.335
5	2018	4.428.094	58.728.666	63.156.760

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Jawa Barat

Sumber: Disbudpar Jawa Barat, BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka (diolah)



Gambar 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Jawa Barat

Sumber: Disbudpar Jawa Barat, BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka (diolah)

Dari gambar dan tabel di atas dapat diketahui jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Barat dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan kunjungan yang relative naik di setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 1.905.378 dan domestik 42.758.063 orang. Dan cenderung meningkat hingga di tahun 2016 dengan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara berjumlah 63.156.760 orang.

Tulisan lain dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh situs web *The Economist* juga menyebutkan adanya prospek yang cukup besar bagi industri pariwisata halal, tidak hanya berhubungan dengan produk halal seperti makanan ataupun minuman non-alkohol tetapi juga pelayanan yang halal terutama yang berhubungan dengan interaksi antara wisatawan laki-laki dan perempuan.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh *World Travel Market* di London pada tahun 2017 disebutkan bahwa ada potensi yang sangat besar bagi pariwisata halal dari sisi ekonomi.

Hingga 2018, pertumbuhan industri pariwisata halal dapat dikatakan sebagai pertumbuhan terbesar dibandingkan dengan jenis pariwisata lainnya. Pariwisata halal dalam artikel yang diterbitkan oleh *traveltourismindonesia.com* digambarkan sebagai berikut:

- a. Tumbuh 100% lebih cepat daripada sektor wisata lainnya
- b. Mencapai \$ 135 miliar nilai pemesanan perjalanan ke luar negeri (*outbound*)
- c. Diprediksikan akan tumbuh hingga \$ 200 Miliar pada tahun 2022
- d. Akan menjadi sebuah generator besar bisnis langsung dan jangka panjang dengan pendapatan maksimum.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas maka judul dalam penelitian ini adalah ***“ANALISIS MODEL PARIWISATA HALAL BAGI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI JAWA BARAT”***

B. Rumusan Masalah

Salah satu indikator yang digunakan untuk menganalisa pariwisata halal agar meningkatkan perekonomian daerah, dan sebagai salah satu faktor penentu tingkat perekonomian daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh daerah tersebut. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba perusahaan daerah dan penerimaan pendapatan asli daerah yang sah.

Jawa Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat melalui semakin bertambahnya jumlah obyek wisata di Jawa Barat, dan wisata halal khususnya, yang tahun-tahun sebelumnya belum maksimal dikembangkan dan kurang dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu perlu dianalisa secara akademik mengenai sektor pariwisata halal guna meningkatkan pendapatan asli daerah-daerah yang ada di Jawa Barat.

Adapun hal-hal yang menjadi objek analisis adalah :

1. Bagaimana faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dalam pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat?
2. Bagaimana faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat?
3. Bagaimana strategi pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat?
4. Bagaimana model pengembangan pariwisata halal yang tepat bagi sumber Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Identifikasi Model Pengembangan sektor Pariwisata Halal, khususnya bagi Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dalam pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat.
- c. Mendeskripsikan strategi pengembangan pariwisata halal yang ada di Jawa Barat.
- d. Mendeskripsikan model untuk pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi tentang Pariwisata Halal dan Pendapatan Asli Daerah,
- b. Sebagai referensi dalam penelitian yang akan datang tentang Pariwisata Halal dan Pendapatan Asli Daerah,
- c. Mengembangkan metodologi penelitian lebih lanjut tentang Pariwisata Halal dan Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran dan hasil pelaksanaan program, dan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja pemerintah provinsi Jawa Barat,
- b. Merupakan bahan evaluasi dan masukan untuk selanjutnya dapat menentukan arah kebijakan dalam perencanaan daerah di Jawa Barat.

